

Implementasi Program Indonesia Emas Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia

HERMAN H, HASELMAN, MUHAMMAD YUNUS

Staf Pengajar pada Universitas Negeri Makassar

hermanfikunm@yahoo.co.id

Abstrak

Secara umum prestasi olahraga Indonesia belum menampakkan hasil yang menggembirakan, dan cenderung tertinggal dibanding negara lain di kawasan Asia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari Program Indonesia Emas tentang olahraga prestasi di tingkat internasional, dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program tersebut serta memodifikasinya. Penelitian ini melakukan pengambilan datanya dari para narasumber di DKI Jakarta pada KEMENPORA, KOI, KONI, Dewan Pelaksana PRIMA, Satuan Pelaksana Tugas PRIMA, Pengurus cabang olahraga dan stakeholder olahraga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan deskriptif-eksplanatory dengan fokus analisisnya pada Program Indonesia Emas. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa implementasi Program Indonesia Emas di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di kategorikan kurang berhasil, karena faktor-faktor yang diteliti yaitu komunikasi, Sumber daya, Sikap, Struktur birokrasi, Lingkungan, Ukuran dan tujuan, Politik, Pendanaan, serta Rekrutmen tidak bersinergi dengan baik satu sama lainnya, dimana faktor penghambat lebih mendominasi dibandingkan faktor pendukung, sehingga implementasi program tidak efektif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Program, Program Indonesia Emas.

Abstract

In general, Indonesia's sports achievements tend to left behind among other Asian countries. The purpose of this study is to analyze the implementation of Gold Indonesia Program – which was initiated to elevate the Indonesia's sports achievement in international level - by analyzing the supporting and inhibiting factors in the implementation process and modify it. This study collected data from informants in Provincial Government of Jakarta, the Indonesian Ministry of Youth and Sport, National Olympic Committee (KOI), National Sport Committee of Indonesia (KONI), PRIMA Executive Council, PRIMA Acting Unit, Board sports and sport stakeholders. This study was conducted in qualitative method with case study-explanatory descriptive analysis and focusing on Indonesian Gold Program. This study found that the Gold Indonesian Program was not successful because all fundamental factors in this program – consist of communication, resources, attitudes, bureaucratic structure, environment, size and destination, Politics, Funding, and recruitment - did not well synergize. In other words, the limit factors are more dominating rather than contributing factors that stimulate ineffective implementation.

Keywords: Policy Implementation Program, Gold Indonesia Program.

I. PENDAHULUAN

Keterpurukan prestasi olahraga di tingkat internasional diduga dipengaruhi oleh faktor proses implementasi program yang terjadi di lapangan, sebab tersebut memerlukan suatu model dalam implementasi program dengan berbagai pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara harmonis, terpadu dan jangka panjang yang didukung dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan keberkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan olahraga.

Dalam Implementasi Program Indonesia Emas yang merupakan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga menuju prestasi internasional, ada berapa faktor yang menurut peneliti tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perkembangan prestasi olahraga di negara kita di tingkat internasional tidak menunjukkan prestasi yang membanggakan, oleh sebab itu peneliti berusaha mengkaji lebih mendalam tentang beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut para ahli implementasi kebijakan adalah sebagai berikut : (1) *komunikasi* yaitu yang berkenaan dengan bagaimana program dikomunikasikan pada organisasi atau publik, (2) *Ketersediaan sumber daya* untuk melaksanakan program, (3) *Sikap dan komitmen* dari para pelaku yang terlibat, (4) *struktur birokrasi* pelaksana kebijakan, (5) *Lingkungan Organisasi*, (6) *Faktor ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan*, (7) *Politik*, (8) *Pendanaan*, dan (9)

Rekrutmen. Setiap faktor-faktor tersebut merupakan gabungan yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa pandangan para ahli implementasi kebijakan.

Menurut Model Merilee S. Grindle (1980) dalam implementasi adalah proses administrasi dan politik. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sarana tersebut. Grindle (1988) menetapkan dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu; (1) isi dari kebijakan (*content of policy*), dan (2) konteks dan implementasi (*context of implementation*). Menurut Edward III (1980) ada empat faktor atau *critical factors* yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu *communication, resources, disposition or attitude*, dan *bureaucratic structure*.

Meter dkk.(2002) menyarankan model yang terdiri dari 6(enam) faktor yang terhubung secara dinamis untuk menghasilkan keluaran “kinerja”, faktor-faktor tersebut terdiri dari (1) *Policy standards and objectives* (2) *The resources and incentives* (3) *The quality of inter-organizational relationship* (4) *The characteristics of the implementation agencies* (5) *The economic, social and political environment* (6) *The ‘disposition’ or response of the implementers, involving three elements: ‘their cognition of the policy, the direction of their response to it and the intensity of that response*. Menurut Rondinelli dan Cheema, ada dua pendekatan dalam proses implementasi yang sering dikemukakan. *Pertama, the compliance approach*, *Kedua, the political*

approach (1983).

Menurut Sabatier (1986) memodifikasi model mereka pada tahun (1973), mengidentifikasi tiga faktor bebas (independen faktor) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :faktor (1) mudah atau sulitnya mengendalikan masalah yang dihadapi, meliputi indikator kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

Faktor kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya, dengan indikator : 1). kejelasan dan konsistensi tujuan, 2). ketepatan alokasi sumber daya, 3). keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana, 4). aturan keputusan dan badan pelaksana, 5). rekrutmen pejabat pelaksana, 6). akses pihak luar secara formal.

Faktor pengaruh langsung faktor politik/kepentingan terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan, meliputi indikator: 1).kondisi sosial ekonomi dan teknologi, 2).dukungan politik, 3). sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, 4). dukungan dari pejabat atasan, 5). komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan : (1) Mendeskripsikan Program Indonesia Emas di Kementerian Pemuda dan Olahraga, (2) menganalisa komunikasi, sumber daya, sikap, struktur organisasi, lingkungan, ukuran-ukuran dan tujuan, politik, pendanaan dan rekrutmen dalam Implementasi Program Indonesia Emas di kementerian pemuda dan olahraga, dan (3) bangunan model Implementasi dibuat untuk Program Indonesia Emas di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong (2001;2002), penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Data yang diperoleh dari penelitian ini tidak berupa angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan dan laporan. Adapun lokasi penelitian adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta Program Indonesia Emas. Dengan pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini dikarenakan pelaksanaan Program Indonesia Emas di Jakarta.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari gambar 1 model 9 faktor implementasi program untuk keberhasilan program dapat dijelaskan bahwa keberhasilan program adalah hasil yang dicapai berdasarkan target dan sasaran sesuai tujuan rumusan-rumusan dalam program, Komunikasi adalah proses pelaksanaan program yang sangat penting terutama sosialisasi atau penyaluran informasi program yang jelas, dilaksanakan secara konsisten untuk keberhasilan program. Sumber daya adalah pengelola program yang handal dan pengadaan sarana prasarana berkualitas serta berstandar internasional dengan menerapkan IPTEK secara maksimal untuk keberhasilan program. Sikap adalah cara pengelola yang tanggap dan cepat serta tepat dalam pengambilan keputusan terhadap proses

pelaksanaan program yang disertai dengan komitmen untuk keberhasilan program. Struktur adalah pembentukan struktur disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan aspek-aspek atau unsur-unsur yang didasari pada tugas dan fungsi terhadap jalur koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk keberhasilan program. Lingkungan adalah pelaksanaan program yang efektif dibutuhkan komitmen, sinkronisasi, koordinasi, sinergitas dan harmonisasi antara pelaksana program dengan lembaga terkait untuk keberhasilan program.

Ukuran dan tujuan adalah pencapaian target dalam program dibutuhkan pola strategis yang dirancang secara matang dan tepat sasaran untuk keberhasilan program. Politik adalah dalam pelaksanaan program dukungan politik dari pemerintah dan legislative sangat dibutuhkan terkait kebijakan anggaran, setiap program harus menghindari unsur politisasi untuk keberhasilan program. Pendanaan adalah kebijakan anggaran dalam program dibutuhkan langkah-langkah strategis dan realistis untuk mengusulkan kebutuhan dalam pelaksanaan program, yang di kelola secara transparan dan akutanbel untuk keberhasilan program. Rekrutmen adalah untuk pelaksana program dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui sistem perekrutan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) dan menghindari unsur subyektifitas dalam proses rekrutmen untuk keberhasilan program. Implementasi program adalah tindakan yang dilaksanakan secara efektif dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan program yang telah dirumuskan.

Komunikasi dalam PRIMA sudah berjalan baik, akan tetapi sosialisasi yang

baik dari pusat sampai ke daerah harus melalui media atau rapat koordinasi secara nasional bersama stakeholder olahraga berprestasi di tanah air, guna pengembangan olahraga prestasi ke depan, serta menjelaskan program yang telah disusun oleh PRIMA kepada pengurus cabang olahraga potensial untuk merebut medali pada event internasional dengan konsistensi pemerintah terhadap PRIMA. Ada kesesuaian teori, berdasarkan pengertian George C. Edwards III (1980), komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Menurut Hogwood dkk. (1984), bahwa implementasi kebijakan mempunyai sumber informasi yang sama, memiliki pemahaman tentang kebijakan dengan cara/jalan yang sama, dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Faktor komunikasi yang merupakan salah satu faktor pendorong dan penghambat dalam PRIMA, maka dapat disusun *proposisi mayor* sebagai berikut : Pelaksanaan sosialisasi, kejelasan program sudah baik dan pemerintah/pelaksana konsisten melaksanakan program Indonesia emas

Sumber daya masih minim dalam pengelola PRIMA dan belum memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik dan masih kurangnya sarana prasarana yang berkualitas dengan standar internasional, serta belum menerapkan IPTEK secara maksimal. SATLAK PRIMA harus di back

up oleh stakeholder olahraga prestasi jika implementasi PRIMA akan sukses untuk mencapai prestasi di tingkat internasional. Ada kesesuaian teori Menurut Edward III (1980), sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Hogwood dkk (1984), bahwa perpaduan sumber-sumber daya yang benar-benar tersedia dalam kenyataannya seringkali terjadi hambatan yang serius, misalnya tenaga kerja serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjalankan program yang seharusnya dipersiapkan secara serentak, sehingga keterlambatan sumber-sumber tersebut seringkali terjadi dan berdampak pada penyelesaian program/proyek. Grindle (1980), bahwa sumber daya yang dikerahkan/dilibatkan, setiap keputusan yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan. Faktor sumber daya di atas maka dapat disusun *proposisi mayor* sebagai berikut : pengelola masih minim kompetensi dan pengadaan sarana prasarana yang berkualitas, berstandar internasional dan penerapan IPTEK belum maksimal.

Respon dan tindakan yang baik disertai tanggungjawab dan komitmen yang tinggi sebagai amanah yang harus diemban oleh para pelaksana PRIMA, sehingga akan melahirkan potensi-potensi olahraga yang memiliki karakter dan semangat

kebangsaan yang tinggi untuk berprestasi di tingkat internasional. Para pengurus PRIMA telah melakukan *save evaluation* pasca program 2012 sehingga mereka melakukan perombakan dari berbagai aspek baik itu dalam sistem pengurus, kerjasama dengan pemerintah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sikap yang baik terhadap perkembangan dari pada PRIMA itu sendiri. Perlu adanya semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, rela berkorban, cinta tanah air dan percaya diri yang ditanamkan sejak dini pada atlet, pelatih dan pengurus PRIMA sejak dini. Menurut Edward III (1980), bahwa dalam organisasi ada kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana. Meter dan Van Horn itu dalam Hill dkk. (2002), dapat diartikan sebagai kecenderungan tanggungjawab pelaksana kebijakan yang meliputi kesadaran, arahan, dan intensitas tanggungjawab terhadap implementasi kebijakan publik. Faktor sikap yang merupakan salah satu faktor pendorong dan penghambat dalam PRIMA maka dapat disusun *proposisi mayor* sebagai berikut: Pengelola kurang tanggap dan lambat dalam pengambilan keputusan terhadap pengurus besar induk cabang olahraga, butuh komitmen terhadap pelaksanaan program

Dalam membentuk struktur birokrasi kita harus melihat yang namanya stabilitas dan perubahan sehingga tidak mengganggu proses organisasi dalam bekerja. Struktur organisasi yang dibentuk sesuai kebutuhan organisasi dengan menempatkan orang-orang yang fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi serta memiliki komitmen yang tinggi dalam PRIMA. Edward III (1980), bahwa meskipun

sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Grindle (1980), bahwa kemungkinan terjadi perbedaan keberhasilan implementasi yang diakibatkan oleh perbedaan kapasitas birokrasi dalam mengelola keberhasilan program. Faktor struktur birokrasi yang merupakan salah satu faktor pendorong dan penghambat dalam PRIMA maka dapat disusun *proposisi mayor*: Ketika pembentukan struktur organisasi harus sesuai kebutuhan yang didasari pada tugas dan fungsinya serta jalur koordinasi

Dengan adanya dukungan dalam PRIMA dari lembaga terkait perlu ada komitmen yang baik untuk mengaplikasikan visi dan misi dalam PRIMA, sehingga keterlibatan banyak unsur dalam pelaksanaan PRIMA terjadi sinkronisasi dan koordinasi yang solid guna menghindari intervensi dan campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dapat dihindari, sepanjang intervensinya mengarah kepengcitraan positif terhadap prestasi olahraga. Mazmanian dkk. (1983), mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi setidaknya oleh lingkungan kebijakan

Faktor lingkungan yang merupakan faktor pendorong dan penghambat dalam PRIMA maka dapat disusun *proposisi mayor* sebagai berikut : Komitmen, sinkronisasi, koordinasi, sinergitas, dan harmonisasi antara SATLAK PRIMA dengan lembaga terkait.

Pelaksanaan program pembinaan satuan pelaksana tugas program Indonesia emas belum tepat sasaran. Kesesuaian program dan ketepatan sasaran untuk mencapai prestasi di tingkat internasional PRIMA harus merancang pola pembinaan 8 tahun sampai 12 tahun pada atlet yang memiliki prestasi nasional pada cabang olahraga yang potensial untuk merebut medali pada event Sea Games, Asia Games dan Olympic Games. Ada kesesuaian teori Mazmanian dkk. (1983), bahwa kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya dengan berbagai indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. Rondinelli (1983) bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh dengan cara mana tujuan-tujuan itu dirumuskan. faktor ukuran dan tujuan yang merupakan faktor pendorong dan penghambat PRIMA, maka dapat disusun *proposisi mayor* adalah Pola pembinaan disesuaikan dengan target dan pelaksanaan program maka akan tepat sasaran.

Pentingnya membangun kerjasama SATLAK PRIMA dengan stakeholder olahraga prestasi serta lembaga terkait. Dukungan politik pada PRIMA sangat dibutuhkan baik itu dari eksekutif, legislatif terutama masalah anggaran, PRIMA harus membangun kerjasama dengan stakeholder olahraga prestasi dan lembaga-lembaga terkait agar PRIMA bisa terlaksana secepat efektif. Ada kesesuaian teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1984) bahwa *The premises of policy and theory must be compatible*. Pada satu kesempatan kepemilikan publik dilihat sebagai alternative kebijakan yang tepat. Saat ini satu pilihan yang tepat menurut teori dalam banyak keadaan, tetapi tidak dapat diterima

secara politik. Rondinelli (1983) bahwa politik/kepentingan terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan yakni dukungan politik, sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, dan komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana

Faktor politik pendorong dan penghambat program maka dapat disusun *proposisi mayor* sebagai berikut : pemerintah dan legislatif mendukung penuh anggaran program maka problem bisa terhindari, kerjasama dalam berbagai pihak itu penting untuk mensukseskan program dan politisasi harus di hindari

Dari penelitian ini tampak Sosialisasi program Indonesia emas sudah berjalan baik itu dari pusat sampai ke daerah harus melalui media atau rapat koordinasi secara nasional bersama stakeholder olahraga prestasi di tanah air dan kejelasan program serta konsistensi pemerintah terhadap program sudah bagus. Kesimpulan faktor komunikasi pada program Indonesia Emas adalah proses sudah terlaksana baik guna keberhasilan program. Sumber daya manusia masih minim dalam pengelola program serta kompetensi dan kemampuan yang belum maksimal dan masih kurang sarana prasarana yang berkualitas dengan standar internasional, serta belum menerapkan IPTEK secara maksimal. Kesimpulan faktor sumber daya pada program Indonesia Emas belum terlaksana secara baik untuk keberhasilan program.

Persepsi, respon dan tindakan masih lambat dalam pelaksanaan program, walaupun ada juga yang sudah berjalan dengan baik. Kesimpulan faktor sikap dalam program Indonesia Emas belum maksimal terlaksana untuk keberhasilan

program. Bentuk struktur organisasi dalam satuan pelaksana program Indonesia Emas masih gemuk dan orang-orang yang dilibatkan di dalam belum fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, walaupun sudah ada beberapa yang fokus tapi belum maksimal. Kesimpulan faktor struktur dalam program Indonesia Emas belum terlaksana secara maksimal untuk keberhasilan program. Dukungan dalam Program Indonesia Emas dari lembaga terkait dan keterlibatan banyak unsur untuk melaksanakan visi dan misi dalam PRIMA belum maksimal, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi belum solid. Walaupun ada hubungan yang sudah berjalan baik. Kesimpulan faktor lingkungan dalam program Indonesia Emas, proses dukungan lembaga terkait belum terlaksana secara maksimal untuk keberhasilan program. Kesesuaian program dan ketepatan sasaran yang dirancang belum maksimal untuk persiapan multi event seperti olympic games. Kesimpulan faktor ukuran dan tujuan pada program Indonesia Emas belum terprogram secara maksimal untuk keberhasilan program.

Sponsor yang terlibat pada PRIMA sebagai berikut: bantuan anggaran dalam pelaksanaan multi event PRIMA bersumber dari APBN, BUMN dan masyarakat. Sumber anggaran PRIMA berasal dari APBN, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang realistis untuk anggaran PRIMA sehingga dapat 5 % sampai 10 % dari APBN. Dana PRIMA dikelola secara transparan dan akuntabel dan pendanaan PRIMA ada tiga pilar utama yang pertama bersumber dari APBN, BUMN, dan masyarakat, untuk mencapai harapan yakni berprestasi di tingkat internasional sehingga tidak ada lagi kendala terkait masalah pendanaan.

Ada kesesuaian teori Dennis A. Rondinelli dkk. (1983) Sumber daya organisasi; terdiri dari kontrol terhadap sumber dana, keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program, ketepatan alokasi anggaran, pendapatan yang cukup untuk pengeluaran, dukungan pemimpin politik pusat dan lokal, komitmen birokrasi. Kemudian Hogwood dkk. (1984) memberikan penyelesaian mengenai *In implementing the policy there must be an adequate time frame and resources*. Kebijakan mungkin tepat, mungkin juga gagal sebab implementasinya dilaksanakan dalam waktu yang lama atau lebih mahal dibanding anggaran yang disediakan. Pendanaan yang merupakan faktor pendukung dan penghambat dalam PRIMA maka dapat disusun *proposisi mayor*: Anggaran PRIMA sudah jelas, tinggal langkah-langkah strategis dan realistis perlu ditempuh untuk mencapai 3 % sampai 7 % dari APBN untuk olahraga prestasi yang di kelola secara transparan dan akutanbel

Sistem perekrutan pelatih dan atlet harus memiliki standarnisasi yang akurat. SATLAK PRIMA yang mana satuan tersebut diusulkan oleh Dewan Pelaksana dan ditetapkan oleh Menteri dan ini akan membentuk SATLAK PRIMA atau restrukturisasi itu dalam kewenangan dari pelaksana prima, sehingga dewan itulah yang mengkaji bagaimana mengusulkan orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Sementara proses rekrutmen pengurus, pelatih, dan atlet seharusnya dilakukan secara professional yang mana menggunakan item test. Baik itu test kemampuan akademik dan juga kemampuan dalam bidang organisasi dan pengetahuannya tentang olahraga, kemudian proses testnya betul diawasi

secara ketat tanpa ada unsur KKN agar nantinya didalam proses rekrutmen kita betul-betul mendapatkan orang yang berkompeten di bidangnya sesuai apa yang dibutuhkan PRIMA. Dalam rekrutmen pelatih dan atlet umumnya memiliki standar. Pelatih rata-rata mantan atlet yang berpengalaman, kemudian yang basicnya pun belum lengkap, sedangkan atlet rata-rata memiliki prestasi nasional dan prestasi internasional. Ada kesesuaian teori Mazmanian dan Sabatier (1983, 1986) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi salah satu indikatornya adalah rekrutmen pejabat pelaksana yang kompeten. Faktor Rekrutmen yang merupakan faktor pendorong dan penghambat dalam PRIMA maka dapat disusun *proposisi mayor*, adalah Sistem perekrutan pelaksana dibutuhkan fit and proper test dan Sistem perekrutan pelatih dan atlet harus memiliki standarnisasi yang akurat.

IV. PENUTUP

Dukungan dari pemerintah dan legislatif terhadap program Indonesia Emas belum maksimal terkait masalah anggaran dan anggaran olahraga masih digunakan sebagai tempat untuk melakukan korupsi serta sebagai alat untuk kepentingan politik praktis dalam mendukung partai politik tertentu. Kesimpulan faktor politik pada program belum terlaksana untuk keberhasilan program. Sumber anggaran pada program dari APBN yang jumlahnya masih di bawah 3 % sampai 7 % dari APBN. Dana PRIMA dikelola secara transparan dan akuntabel dan pendanaan PRIMA ada tiga pilar utama yang pertama bersumber dari APBN, BUMN dan masyarakat untuk kegiatan multi event.

Kesimpulan faktor pendanaan belum maksimal tercapai dan terlaksana untuk keberhasilan program. Sistem perekrutan yang menggunakan pola penunjukan langsung untuk jabatan Ketua SATLAK PRIMA diusulkan oleh Dewan Pelaksana dan ditetapkan oleh Menteri dan penunjukkan SATLAK PRIMA. Dalam rekrutmen pelatih dan atlet umumnya memiliki standar dan sudah bagus. Pelatih rata-rata mantan atlet yang berpengalaman. kendalanya kemudian adalah dasar kepelatihan yang belum lengkap, sedangkan atlet rata-rata memiliki prestasi nasional dan prestasi internasional. Kesimpulan faktor rekrutmen belum terlaksana dengan baik untuk keberhasilan program.

Saran yang dapat peneliti berikan secara teoritis adalah peneliti memberikan sumbangan pemikiran yang mungkin dapat dilakukan dalam menyikapi ketidakberhasilan Implementasi Program Indonesia Emas, yaitu berupa model pendekatan 9 (sembilan) faktor guna mendukung keberhasilan implementasi Program Indonesia Emas, dengan memaksimalkan faktor komunikasi sebagai faktor yang memfasilitasi, merekatkan dan menunjang semua faktor yang digunakan. Diperlukan pola promosi dan degradasi atlet, pelatih dan manager yang profesional. Lembaga terkait harus komitmen terhadap atlet, pelatih dan manager yang telah ditetapkan dalam program Indonesia emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. University Press Princeton New Jersey.
- _____. 1988. *Politics and Policy Implementation The Third World*.
- Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. SAGE Publication Ltd. London.
- Hogwood, Brian W. and Gunn, Lewis A. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: University Press.
- Mar'at. 1982. *Sikap Manusia: Perubahan dan Pengukuran*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Foresman and Company.
- Meter, Van; Donald S & Van Horn, Carl E. 2002. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
- Moloeng, Lexy.J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rondinelli, Dennis A. Rondinelli And G. Shabbir Cheema. 1983. " *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications Inc.
- Sabatier, Paul A. 1986. *Theories of The Policy Process. Second Edition*. Colorado USA: Westview Pess.
- Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.
- Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Keolahragaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI, Jakarta, 2005.